

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era otonom daerah, pada pemerintah daerah haruslah dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan daerahnya. Pemerintah haruslah mengetahui kompetensi, khususnya dalam pengelolaan investasi daerah. Untuk saat ini Barang Milik Daerah tidak hanya untuk menjadi sarana dan prasarana agar urusan pemerintah dapat diwujudkan namun Barang Milik Daerah haruslah dapat dioptimalkan menjadi penggerak perekonomian daerah. Melalui pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi pemerintahannya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada penerapan sistem pemanfaatan barang milik daerah haruslah dikelola dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat bagi sektor swasta maupun sektor publik dan demi terciptanya *good government* dan namun jika barang milik daerah tidak dikelola dengan baik, pemerintah akan mengalami pemborosan keuangan daerah melalui pemeliharaan asset yang tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan.

. Suatu sistem haruslah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kemudahan dalam kegiatan operasionalnya dan dalam suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah haruslah terdapat sistem untuk proses berjalannya

suatu kegiatan agar berjalan dengan baik dan benar dan pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara masih terdapat yang tidak menggunakan sistem dalam kegiatan operasionalnya, dan sudah ada yang terdapat sistemnya.

Pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan barang milik daerah untuk pengelolaan sistem pemanfaatan barang milik daerah yang digunakan hanya pemanfaatan sewa dan pinjam pakai saja, untuk kerjasama pemanfaatan dan barang serah guna atau barang guna serah masih belum diterapkan dikarenakan masih kurangnya modal, dan faktor lainnya. Dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfaatan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara berpendoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, untuk besaran tarif sewa untuk pengelolaan barang milik daerah tentang pemanfaatan berpendoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 tahun 2019 tentang Besaran Formula/Tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 yang disewakan berupa non lelang terdiri dari 157 tanah atau bangunan dengan masa sewa harian, bulanan, dan tahunan, untuk yang disewakan dari lelang eks bengkok terdapat 168 tanah dari 11 Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara dan terdapat 75 objek pinjam pakai yang dipinjam pakaikan berupa tanah, bangunan, alat tulis kantor dan kendaraan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis sangat ingin untuk mengetahui dan mengupas bagaimana sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada pengelolaan pemanfaatan aset milik pemerintah adakah kendala-kendala yang sering muncul serta pada Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dan apakah dalam penerapannya sistem pemanfaatan barang milik daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Maksud Praktik Kerja Lapangan yang menunjukkan pada apa yang dilakukan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara lain:
 - 1) Mempelajari tentang bidang aset di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
 - 2) Mempelajari lebih dalam tentang pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada pengelolaan pemanfaatan di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
 - 3) Untuk melengkapi sebagian syarat kelulusan studi pada program studi akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamamdiyah Purwokerto.
- b. Tujuan
 - 1) Mengimplementasikan bagaimana teori yang dipelajari saat di perkuliahan dengan saat di dunia kerja serta akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan ke dalam kegiatan yang nyata khususnya dalam bidang Akuntansi.

- 2) Menambah ketrampilan *soft skill* dan *hard skill* mendalam dalam dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan praktiknya khususnya akuntansi
- 3) Membangun kepribadian yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab

c. Manfaat

1) Manfaat untuk Mahasiswa:

1. Meningkatkan pengalaman kerja mahasiswa sebelum masuk ke dalam dunia kerja.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membandingkan antara konsep atau teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan operasional di dunia kerja.
3. Mengetahui penerapan akuntansi yang digunakan dalam Instansi Pemerintah
4. Memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja karena mampu menjadi sarana dalam penerapan teori, yang terdapat dalam dunia kerja yang nyata pada bidang Akuntansi
5. Membangun rasa tanggungjawab dan profesional dalam bekerja
6. Meningkatkan mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam dunia kerja.

2) Manfaat untuk Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP:

1. Dapat menjalin kerjasama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Banjarnegara

2. Sebagai sarana memperkenalkan jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto kepada khalayak yang lebih luas
 3. Memperluas jaringan kerja bagi para Sarjana dan Ahli Madya lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 4. Sebagai bahan acuan dalam penilaian akademik mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan melalui praktik dalam dunia kerja nyata.
 5. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa mendatang
- 3) Manfaat untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Banjarnegara:
1. Dapat menjalin hubungan kemitraan yang baik, dengan perguruan tinggi
 2. Membantu meringankan pekerjaan instansi melalui program kerja yang diberikan kepada mahasiswa
 3. Membantu instansi untuk mendapatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam perekrutan pegawai yang baru melalui Praktek Kerja Lapangan atau melalui hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam hal

kemampuan waktu dan tenaga maka peneliti ini hanya membatasi masalah pada sistem pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan dari tempat Praktik Kerja Lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui;

a. Metode Observasi

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan praktik kerja di lapangan. Data dapat diperoleh dari buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan system pemanfaatan sewa dan pinjam pakai pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

b. Metode Interview

Metode interview yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pegawai yang berakitan dengan tema yang penulis ambil dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung mengenai tentang sistematis pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan pendukung dalam penyusunan laporan kerja praktik. Data sekunder diantaranya:

a. Dokumentasi

Data tambahan pendukung diperoleh dari arsip-arsip data, formulir yang dimiliki oleh bidang aset yang berkaitan dengan system pemanfaatan Barang Milik Daerah dari mulai permohonan sewa sampai dengan pengakhiran sewa.

b. Studi pustaka

Data ini diperoleh dari buku-buku yang ada di tempat praktik kerja lapangan atau buku-buku yang terdapat di perpustakaan yang mendukung dan berhubungan dengan sistem Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

1.6 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKL

No.	Keterangan	Februari				Maret				April-Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
TAHAP PERSIAPAN														
1	Melakukan observasi ke lokasi PKL	√												
2	Meminta surat pengantar dari TU fakultas	√												
3	Konfirmasi persetujuan dari tempat PKL		√											
TAHAP PELAKSANAAN														
4	Melaksanakan praktik kerja lapangan							√	√	√	√	√	√	√
5	Melakukan wawancara kepada beberapa karyawan terkait pekerjaan							√	√	√				
TAHAP PELAPORAN														
6	Mengajukan judul tugas akhir									√				
7	Mencari data dokumen mengenai judul tugas akhir										√	√		
8	Melakukan wawancara mengenai judul tugas akhir ke beberapa pegawai										√	√		
9	Membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan										√	√	√	